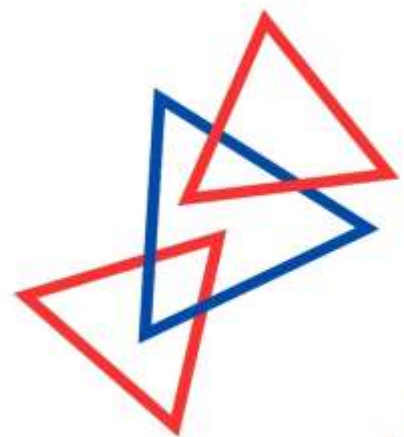




**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERIKANAN**

# **LAPORAN KINERJA 2022**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dapat kami diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu disusun berdasarkan Amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban tahunan terhadap semua pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan. Selain itu Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu dan sebagai alat umpan balik (*feed back*) untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan ke depan.

Kami menyadari LKIP yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan kinerja yang ideal, namun kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, pengembangan dan penyempurnaan LKIP ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap melalui LKIP ini Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan "Good Governance" di lingkungan internal khususnya dan Pemerintah Kabupaten pada umumnya.

Putussibau, 24 Februari 2023

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Kapuas Hulu,



BAMRANG S.E., M.Si  
Pembina Tingkat 1/IVb  
NIP. 19670515 199503 1 005

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 melaporkan capaian kinerja (*performance result*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*). Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2022, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan kegiatan untuk memacu program prioritas dalam pembangunan perikanan. Untuk menyusun Laporan Kinerja diperlukan suatu sistem yaitu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari indikator serta mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dalam manajemen modern pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna perbaikan. Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan dimanfaatkan oleh pemberi mandat sebagai bahan evaluasi dan oleh manajemen Dinas Perikanan akan digunakan sebagai salah satu pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan masyarakat perikanan yang tangguh, maju dan mandiri serta bertanggung jawab dalam iklim usaha yang kondusif di era globalisasi.

Masyarakat umum menghendaki agar Pemerintah menyelenggarakan sistem Akuntabilitas Kinerja yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disisi lain setiap instansi dituntut untuk melakukan perbaikan terus menerus dan berkesinambungan sehingga pemerintah benar-benar menjalankan praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, efektif, produktif, demokratis, adil, bertanggung jawab, transparan dan tanggap terhadap perubahan.

Dengan berorientasi kepada Rencana Strategis tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022, maka dalam tercapainya visi, misi dan sasaran serta menjalankan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan 5 ( Lima ) Program pembangunan yang meliputi 17 ( Tujuh belas ) kegiatan. beberapa program yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan di tahun 2022, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Guna membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu didukung dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 sebesar Rp. 15.365.341.177 (Lima Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah, dimana pada akhir Desember 2022 Anggaran yang terealisasi sebesar Rp 12.732.620.466 atau sebesar 82,87%. Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2022 menetapkan target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan sebesar Rp. 280.000.000,- terdiri dari UPT BI Kelansin sebesar Rp. 200.000.000; dan TPI sebesar Rp. 80.000.000;. Adapun realisasi penerimaan yang dicapai hingga Desember 2022 sebesar Rp279.038.900; ( UPT BI Rp.200.841.000 dan TPI sebesar Rp. 78.197.900; ) atau 99, 66% dari target PAD yang ditetapkan.

Unit Pelaksana Teknis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu yaitu: Balai Benih Ikan Kelansin dan Tempat Pelelangan Ikan yang semula berjumlah 7 lokasi, Tetapi di Tahun 2022 berkurang menjadi 6 lokasi karena berdasarkan saran dari BPK ( Badan Pemeriksa keuangan ) bahwa pemungutan retribusi yang sarana dan prasaranya tidak ada maka tidak dibenarkan untuk di pungut retribusi, kecuali jika ada sarana dan prasarana yang di bangun. Dengan adanya pengurangan jumlah TPI. Maka di tahun 2022 menjadi 6 Lokasi yaitu : TPI Putussibau Utara, Jongkong, Silat Hilir, Badau, Selimbau, dan Suhaid.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar dengan beraneka jenis sumberdaya perikanan yang bernilai ekonomis tinggi. Dari aspek ekonomi, kawasan danau sentarum dan sekitarnya memiliki kontribusi yang cukup signifikan, baik bagi masyarakat setempat maupun daerah sekitarnya terutama dari produksi ikan air tawar. Didaerah Danau Sentarum dan sekitarnya penduduk melakukan kegiatan perikanan terbanyak adalah penangkapan dan setelah itu budidaya terutama ikan Toman . Potensi ikan di areal danau Sentarum sebenarnya sangat tinggi tetapi akibat meningkatnya jumlah penduduk dan mata pencaharian utama adalah menangkap ikan maka populasi ikan di Danau Sentarum semakin lama semakin berkurang jumlahnya. Kalau tidak ada upaya yang signifikan maka dikhawatirkan dimasa datang akan terjadi kepunahan berbagai jenis ikan yang selama ini menjadi harapan penduduk sebagai mata pencahariannya.

Dibidang pelayanan administrasi pemerintahan dan teknis menunjukkan keberhasilan yang cukup baik, hal ini bisa dilihat dari tingkat pendidikan pegawai pada lingkungan Dinas Perikanan sudah banyak yang berpendidikan minimal S1 dan S2, begitu pula fasilitas kantor sudah memenuhi kelayakan kantor dengan telah ditempatinya gedung kantor Dinas Perikanan yang baru, namun tidak hanya cukup sampai disini saja peningkatan kapasitas aparatur masih terus ditingkatkan guna menunjang kinerja Dinas Perikanan.

Pada akhirnya Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sudah menetapkan tujuan dan sasaran Dinas tahun 2021 -2026 diharapkan dapat dicapai melalui program dan kegiatan Dinas Perikanan.

Dari hasil pengukuran indikator kinerja sasaran, maka pencapaian kinerja pada tahun 2022 dapat dikategorikan sebagai berikut :

No.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Jumlah Indikator
1	2	3
1	Diatas 85	4
2	70 s/d kurang dari 85	0
3	55 s/d kurang dari 70	0
4	Kurang dari 55	0
J u m l a h		4

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu,
- 2). Meningkatkan sarana dan prasarana yang masih belum memadai untuk kelancaran kegiatan rutin,
- 3). Menambah anggaran yang dialokasikan ke Dinas Perikanan untuk kelancaran tugas.

Namun demikian capaian tersebut diatas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi selama tahun 2022. Namun setiap tahun capaian-capaian tersebut akan terus dibenahi dengan berkerja secara optimal dan efisien. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan Akuntabilitas Publik dalam rangka mewujudkan "*Good Governance*" dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya.

## DAFTAR ISI

Halaman



# BAB I.

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

#### 1. Pendahuluan

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Dalam pelayanan di sektor Perikanan berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kepmen. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul. Kemudian Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara reformasi birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Dinas Perikanan adalah :

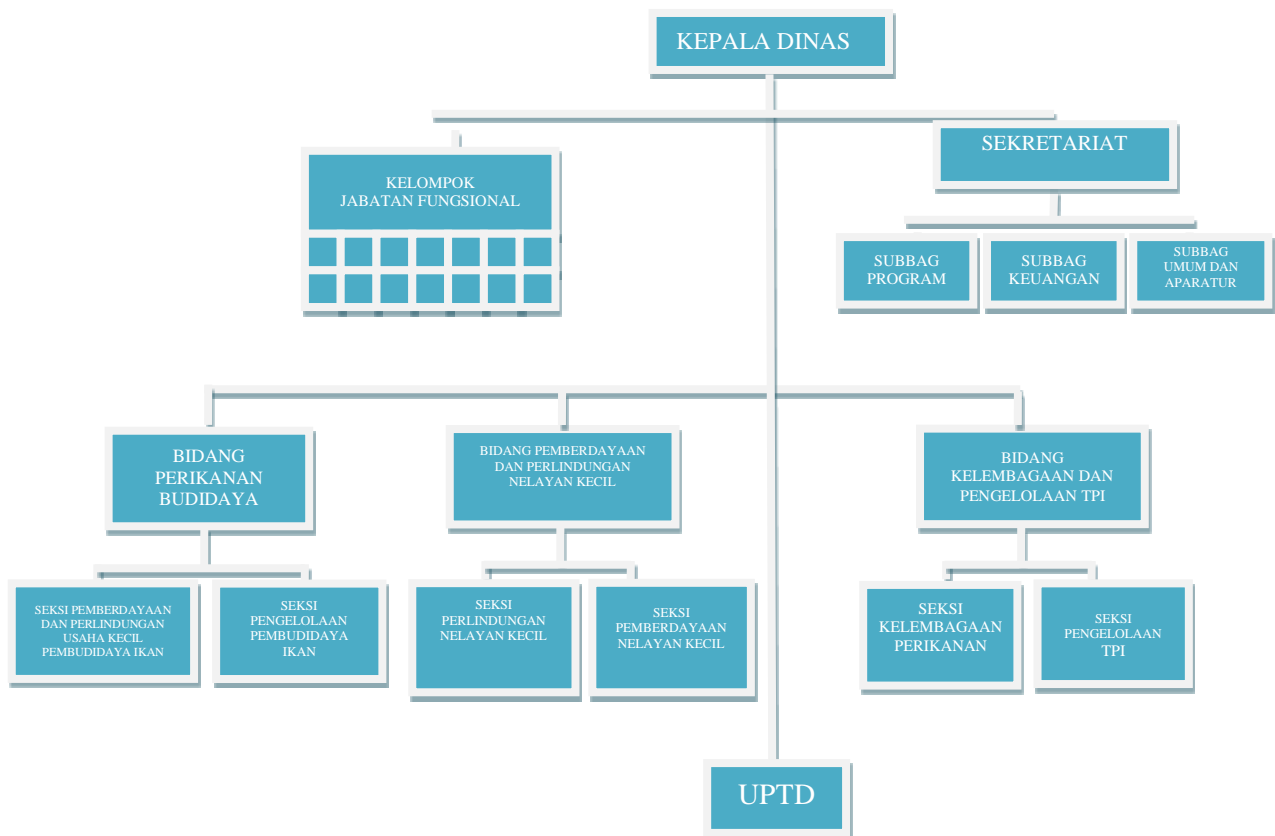
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian mendapat perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tanggal 7 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Bidang Perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
  2. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Susunan Organisasi

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perikanan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Perikanan, Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, penyampaian laporan secara periodik serta melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tupoksinya.



### 3. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022, Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan perikanan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 90 ( Sembilan Puluh ) Orang pegawai ( data sampai dengan Desember 2022) dengan komposisi sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil/ CPNS dengan jumlah 35 orang.

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG				DIKLATPIM	
		S2	S1/ D4	D3	SLTA	SD/ SLTP	I	II	III	IV	SUDAH	BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
2.	III	3	1	-	-	-	-	-	3	1	0	4
3.	IV	7	2	-	-	-	-	-	9	-	5	4
	SUB JUMLAH	11	3	0		0	0	0	12	2	6	8
4.	FUNGSIONAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	11	3	0	0	0	0	0	12	2	6	8

a. Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Pegawai tidak Tetap/Tenaga Kontrak yang berjumlah 55 Orang Terdiri dari : Tenaga Administrasi Perkantoran 29 Orang, Petugas Pengamanan Kantor 2 Orang, Petugas Kebersihan Kantor 2 Orang, Supir/Motoris 1 Orang, Petugas BBI 12 Orang, Petugas TPI 9 Orang, Petugas Biota Langka 1 Orang dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- SMA : 21 Orang
- D3 : 16 Orang
- S1 : 18 Orang

4. Sumber Daya Keuangan

Sumber Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2022, bersumber dari dana APBD Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dan APBN melalui DAK dengan total dana sebesar Rp. Rp. 15.365.341.177 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Tiga Ratus Empat Puluh Satu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah. engan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Sumber Dana Dinas Perikanan tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
1.	BELANJA OPERASI	Rp. 14.244.641.177
	Belanja Pegawai	Rp. 3.678.015.987
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.127.675.190
	Belanja Hibah	Rp. 6.438.950.000
2.	<b>BELANJA MODAL</b>	Rp. 1.120.700.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 161.300.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 369.400.000
	Belanja Modal Jalan Jaringan Irigasi	Rp. 530.000.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 60.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 15.365.341.177</b>

## 5. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan sampai dengan TA.2022

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	5	5			
2	Instalasi PDAM/ PLN/ Telp./Jaringan	8	8			
3	Bangunan :					
	a. Gedung Kantor	20	20			
	b. Rumah Dinas	2	2			
	c. Rumah Tamu (Guest House)	1	1			
	d. Mess, Pos Penyuluh Perikanan, dll	23	23			
	e. Kolam/Bak Ikan	8	8			
	f. Rumah Packing	1	1			
	g. Gedung Pertemuan	2	2			
	h. Tempat Pelelangan Ikan Permanen	1	1			
4	Alat-alat Besar :					
5	Alat Angkut :					
	a. Mobil	5	5			
	b. Sepeda Motor	37	37			
	c. Speed Boat	7	4	1	2	
6	Alat Perikanan :					
	a. Tabung Oksigen	6	6			
	b. Tag Reader	1	1			
	c. Mesin pencetak pelet	2	2			
	d. Fry counter	1	1			
	e. Mesin Pencetak Pakan	2	2			
	f. Aquarium/ Wadah Benih	78	78			
	g. Pompa Air	5	5			
	h. DO Meter	2	2			
	i. pH Tester	8	1	7		
	j. pH meter	11	11			
	k. Hyblow	13	13			
7	Peralatan Meubelair :					
	a. Meja kerja	71	71			

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Meja Rapat (Kecil/ Besar)	10	10			
	c. Meja/ Kursi Tamu	2	2			
	d. Kursi Rapat/ Kursi Kerja	40	40			
	e. Whiteboard/ Papan tulis	4	4			
	f. Rak Buku Perpustakaan	37	37			
	g. Lemari arsip	16	16			
8	Peralatan Kantor :					
	a. Komputer	1	1			
	b. Laptop, Notebook	47	47			
	c. Hardisk Eksternal	1	1			
	d. Proyektor/ Infocus	4	4			
	e. Printer	53	53			
	f. Alat Pendingin (AC)	13	13	1		
	g. Kipas Angin	9	9			
	h. Brankas	1	1			
	i. Mesin Fotocopy	2	1	1		
	j. UPS	1	1			
9	Alat-alat Studio					
	a. Kamera Digital + Asesoris	11	11			
	b. Handycam	2	2			
	c. CCTV	22	22			
	d. Solar Home System	7	7			
	e. Roll Banner	10	10			
10	Alat ukur	1	1			
	a. GPS	7	7			

#### B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIS ISSUED*)

Adapun isu strategis dan permasalahan utama yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya pendapatan nelayan tangkap di sektor hulu;
2. Rendahnya Pendapatan Pembudidaya di sektor hulu;
3. Rendahnya pendapatan Pelaku Usaha Perikanan di sektor Hilir (Pengumpul, Distributor, Jasa Angkutan/Logistik Ikan, Pengolah/ Pedagang ikan dan Pengolah Hasil Perikanan;
4. Rendahnya kontribusi UPR/ Pokdakan dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas;
5. Belum optimalnya kontribusi Balai Benih Dinas dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas;

6. Rendahnya jaminan Ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas, stabil dan hanya terjangkau pada tingkat konsumen (Rumah tangga dan unit Pengolah Hasil Ikan);
7. Berkurang bahkan menghilangnya beberapa jenis ikan endemic kualitas ekspor dan atau bernilai ekonomis tinggi, seperti ikan Arwana, Ringau, Belida dan lain-lain dari PUD.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 s.d 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin terjadi. Disamping itu RENSTRA juga memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan, program yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu kedepan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perikanan saja, melainkan juga unsur Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Kapuas Hulu, dan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 merupakan implementasi Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2021 – 2026, yang merupakan tolak ukur pelaporan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

#### 1. Visi

Dengan memperhatikan arah Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di atas, maka Visi Pemerintah Kabupaten Hulu tahun 2021–2026 adalah:

TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERJIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN  
TRAMPIL “ KAPUAS HULU HEBAT ”

Visi tersebut mengandung beberapa makna sebagai berikut:

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
  2. Energik: mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
  3. Berdaya saing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
  4. Amanah: mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
  5. Terampil: mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.
2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Dengan adanya misi, diharapkan seluruh aparat dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui tugas, fungsi, peran, program kerja Dinas Perikanan serta hasil yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Proses perumusan misi tersebut harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan kondisi serta tuntutan lingkungan.

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi acuan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan.;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi



3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta Meningkatkan Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, Perlindungan perempuan dan anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*).

#### Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan stakeholders, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada misi ke-2 berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Matrik Misi dan Tujuan RPJMD 2021 - 2026

Misi		Tujuan		Indikator	
1		2		3	
2	Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan	2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan	2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)

#### Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, spesifik yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan Bidang-bidang yang terkait di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Sasaran-sasaran pembangunan 5 tahun Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Matrik Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan 2021 - 2026

Tujuan Dinas Perikanan				Sasaran Dinas Perikanan			
Uraian		Indikator		Uraian		Indikator	
1		2		3		4	
1	Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	1	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	1	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabel Kinerja Dinas	1	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan
		2	Nilai Reformasi Birokrasi				
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Perikanan			1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan (%)	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan (%)
		1	Meningkatkan Produksi Ikan Tangkap ( Ton/tahun )	1	Jumlah produksi ikan tangkap	1	Meningkatkan Produksi Ikan Tangkap ( Ton/tahun )
		1	Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya ( Ton/tahun )	1	produksi budidaya	1	Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya ( Ton/pertahun )
		1	Meningkatnya produksi ikan olahan( Ton/tahun )	1	produksi hasil olahan ikan	1	Meningkatnya produksi ikan olahan ( Ton/tahun )

Secara terinci, target Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan perikanan yang akan dicapai tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Lainnya Dinas Perikanan T.A 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	1. Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	1. Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	BB	BB	BB	A	A
			2. Nilai Reformasi Birokrasi	25,20	25,30	25,40	25,50	26,00
			2. Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	BB	BB	BB	A	A
2	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor perikanan	1. Meningkatkan Produksi ikan tangkap 2. Meningkatkan Produksi ikan budidaya 3. Meningkatkan Produksi Hasil Olahan Ikan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan (%)	0.90	1.05	1.12	1,23	1,35
			1. Jumlah produksi ikan tangkap (ton/tahun)	26.120	26.511	26.908	27.311	27.720
			1. Jumlah produksi budidaya (ton/tahun)	25.356	25.608	25.734	25.861	25.990
			1. Jumlah produksi hasil olahan ikan (ton/tahun)	11.700	12.000	12.300	12.500	13.000

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen kesepakatan kinerja antara Bupati Kabupaten Kapuas Hulu selaku atasan dengan para Kepala SKPD selaku bawahan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut mengikat dan merupakan ukuran kinerja keberhasilan kepala SKPD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi masing –masing. Adapun perjanjian kinerja Kepala OPD tahun 2022 yang dibuat pada Februari 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini : Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kepala OPD Dinas Perikanan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	1 .	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	25, 20
		2 .	Nilai Reformasi Birokrasi	
2.	Meningkatkan Produksi Ikan Tangkap	1 .	Produksi ikan tangkap dalam ton/ tahun	26.120
3.	Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya	1 .	Produksi ikan budidaya dalam ton/ tahun	25.482
4.	Meningkatnya produksi ikan olahan	1 .	Jumlah hasil produksi Hasil Olahan Ikan Ton/Tahun	11.700

No	Program	Anggaran (Rp)		Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.521.650.477	APBD
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	1.823.678.432	APBD
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	3.704.308.450	APBD
4	Program Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan	Rp 49.941.250		APBD
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	688.497.247	APBD

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Penyesuaian Kepala OPD Dinas Perikanan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	
				Sebelum	Sesudah
1	2		3	5	6
1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	1	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	25, 20	25, 20
		2	Nilai Reformasi Birokrasi		
2.	Meningkatkan Produksi Ikan Tangkap	1	Produksi ikan tangkap dalam ton pertahun	25.935	25.665
3.	Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya	1	Produksi ikan budidaya dalam ton pertahun	25.356	35. 482
4.	Meningkatnya produksi ikan olahan hasil ikan dalam jumlah dan ragam jenis		Jumlah hasil produksi Ikan olahan ( ton per tahun )	11.700	11.766



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### 1. Pengukuran Kinerja

###### a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Realisasi}) - \text{Rencana}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan 12 indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya 12 indikator dan pengumpulan data serta 12 indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan 12 indikator

kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut :

NO	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3
1.	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2.	$70 \leq X < 85$	Berhasil
3.	$55 \leq X < 70$	Cukup Berhasil
4.	$< 55$	Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang 13 indikator besar didasarkan pada kelompok 13 indikator kinerja berupa 13 indikator masukan dan keluaran. Sebagian lagi berupa 13 indikator hasil (*outcomes*). Sedangkan 13 indikator manfaat, dan dampak 13 indikator baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat 13 indikator pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing 13 indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian 13 indikator kinerja pada level sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

## Pengukuran Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian ( % )
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	1	Nilai Reformasi Birokrasi	25,20	25,20	100
		2	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	BB	BB	100
2.	Meningkatkan Produksi Ikan Tangkap	1	Produksi Ikan Tangkap dalam ( Ton Pertahun)	26.120 Ton	25.665 Ton	98,3
3.	Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya	1	Jumlah Produksi Budidaya ( Ton Pertahun )	25.482	35.079	138
4.	Meningkatkan Produksi Ikan Olahan hasil Ikan dalam Jumlah dan ragam Jenis	1	Jumlah Hasil Produksi Ikan Olahan ( Ton Pertahun )	11.700	11.766	100,6
Rata – rata Capaian Kinerja						107,4

Dari 4 sasaran Pejanjian Kinerja Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) sasaran dalam kategori Sangat Berhasil.

Pencapaian kinerja 14 indikator sasaran dari 4 sasaran dan 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Indikator sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2

## Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perikanan

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	2	3	4
1.	Sangat Berhasil	4	100%
2.	Berhasil	-	-
3.	Cukup Berhasil	-	-
4.	Tidak Berhasil	-	-
5.	Belum ada nilai	-	-



## 2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Sasaran "*Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan*" bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran serta peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 2 indikator Nilai. 1 Nilai Reformasi Birokrasi baru tahun 2022 menargetkan nilai 25, 20 sedangkan realisasinya 25,20 capaiannya mencapai 100% di masuk menjadi indikator utama yaitu pada tahun 2022. 2 Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Adapun nilai (skor) akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan evaluasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyelenggaraan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Capaian Kinerja sasaran "*meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan*" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran  
Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas  
Perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	BB	100 %
	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan				
Capaian Kinerja sasaran Berhasil (100%)					

Tabel 3.4  
Analisis Pencapaian Sasaran  
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	C	98,34	B	B	100	B	B	100	BB	BB	100	BB	BB	BB

Tabel 3.5  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran  
Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	BB	100 %

Target Penyelenggaraan SAKIP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 berdasarkan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi mendapat Predikat “BB”. Realisasi kinerja Tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan yaitu Predikat “BB” dengan capaian kinerja sebesar 100 % Realisasi kinerja indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang mendapat predikat “BB” Jika dibandingkan Tahun 2021, maka predikat SAKIP Dinas Perikanan mengalami perubahan peningkatan kinerja dari capaian sebelumnya yaitu “BB”. Hal ini juga sama halnya Realisasi kinerja indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022 yang mendapat predikat “BB” Jika dibandingkan Tahun 2016 mengalami perubahan yakni pada predikat “C”.

Realisasi kinerja Tahun 2022 yang mendapat predikat “BB” jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Perikanan 2021 - 2026 dengan predikat “A”, maka tingkat kemajuan indikator kinerja Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah mencapai 100%. Keberhasilan Pencapaian kinerja indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan merupakan bentuk tanggung jawab OPD Dinas Perikanan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih bersih dan profesional dengan mewujudkan target indikator yang berorientasi hasil.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja OPD Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan reviu Rencana Strategis RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dan Renja OPD tahun 2022;
2. Inten melakukan koordinasi dengan OPD terkait yang membindangi dokumen perencanaan dan SAKIP seperti Inspektorat, (Ortal) dan (Bappeda) dalam rangka review, revisi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap dokumen dan perencanaan dan evaluasi SAKIP
3. Penyusunan Cascading, Rencana Aksi serta Rencana Kerja Tahunan Bidang masing - masing;
4. Melakukan evaluasi internal secara berkala yakni tiga bulan sekali serta melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja;
5. Melakukan inovasi peningkatan kinerja Dinas Perikanan ;

Pencapaian Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas perencanaan strategis meliputi Renstra, Rencana Kerja, Cascading dan Rencana Aksi Dinas Perikanan;
2. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah belum berorientasi hasil (Outcome);
3. Capaian program belum selaras dengan IKU Kepala Dinas :
4. Cascading kinerja yang merupakan kinerja turunan dari pejabat di atasnya belum sinkron dengan kegiatan yang dilakukan;
5. Masih kurangnya data dan informasi pendukung sebagai dasar penyusunan pelaporan kinerja serta tindak lanjut permasalahan yang dilaporkan;
6. Masih terdapatnya kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis;
7. Masih terdapatnya sub kegiatan atau belanja yang kurang berimplementasi kegiatan dan program;
8. Masih lemahnya pendokumentasian hasil kegiatan baik berupa data maupun dokumentasi foto dan video;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SAKIP di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menargetkan predikat SAKIP yaitu sesuai dengan predikat tahun sebelumnya yaitu BB. Agar dalam pelaksanaannya mengalami peningkatan kualitas maka Dinas Perikanan mencantumkan beberapa rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan predikat sakip yaitu :

1. Membuat jadwal dan SOP tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik ;
2. Dalam monitoring rencana aksi agar
  - Menambahkan pembahasan pencapaian target pada IKU
  - Menetapkan target yang direncanakan secara periodik
  - Mengukur realisasi secara berkala

- Membuat analisis dan alternatif solusi terhadap pencapaian target
  - Memanfaatkan sepenuhnya dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan ;
3. Dalam pengukuran perjanjian kinerja dengan membuat kesimpulan keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian target kinerja;
  4. Membuat peraturan kepala dinas tentang reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) terhadap kinerja pegawai;

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota  
Kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan:
    - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD
    - c) Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD
    - d) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
    - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - f) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan:
    - a) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - d) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
    - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan:
    - a) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
    - b) Penataan Usaha Barang Milik Daerah pada SKPD
  - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

a) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

a) Pendapatan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

b) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

f. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan  
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi Ikan Tangkap

Sasaran "*Meningkatkan Produksi Ikan Tangkap*" bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun cara mengukur produksi Ikan Tangkap dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

**Jumlah Hasil Tangkapan Nelayan ( Jaring Insang Hanyut + Jaring Insang Tetap+ Serok + Anco + Rawai + Pancing +Serok + Jermal + Bubu +Jala Tebar + Pukat Labuh )**

Untuk mengukur "*Meningkatkan Produksi Ikan Tangkap*" maka dilakukan survey oleh Numerator, Pengolah data, Validator dan buckp up Validator Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Metode tersebut dilakukan dengan survei, wawancara atau observasi kepada Nelayan yang sesuai dengan Hasil Tangkapan Nelayan berdasarkan alat tangkap yang digunakan seperti Jaring Insang

Hanyut, Jaring Insang Tetap, Serok, Anco, Rawai, Pancing, Serok , Jermal, Bubu, Jala Tebar, dan Pukat Labuh. Berdasarkan hasil produksi tangkap selama tahun 2022, berdasarkan alat tangkap yang tersebar di daerah daerah potensi produksi ikan tangkap



**DATA PRODUKSI IKAN TANGKAPAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) Kab. KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No.	Alat tangkap	Jenis Ikan	Kecamatan													
			Selimbau	Suhaid	Jongkong	Bunut Hilir	Embaloh Hilir	Bika	Batang Lupar	Badau	Semitau	Silat Hilir	Pts.Utara	Pts.Selatan	Embaloh Hulu	Total
1.	Jaring Insang Hanyut	1 Baung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 Jelawat	31.648	18.701	17.263	19.873	11.508	6.492	14.857	8.160	4.582	3.543	2.406	1.439	3.383	143.855
		3 Lais	8.775	5.185	4.786	5.505	3.191	1.797	4.111	2.270	1.276	996	675	399	920	39.885
		4 Kelabau	14.938	8.827	8.148	9.340	5.432	3.043	6.952	3.912	2.203	1.772	1.196	679	1.457	67.900
		5 Tengadak	39.707	23.463	21.658	24.828	14.439	8.089	18.478	10.400	5.855	4.711	3.180	1.805	3.873	180.487
		6 Patik	53.689	31.726	29.285	33.571	19.523	10.938	24.985	14.062	7.917	6.370	4.300	2.440	5.237	244.043
		7 Entukan	153.927	90.957	83.960	96.517	55.974	31.501	72.044	39.903	22.426	17.584	11.916	6.997	15.963	699.669
		8 Tambakan	53.407	31.558	29.131	33.588	19.421	10.982	25.149	13.692	7.681	5.850	3.981	2.428	5.889	242.757
		9 Seluang	45.888	27.115	25.030	28.985	16.686	9.502	21.800	11.572	6.474	4.713	3.229	2.086	5.500	208.581
		10 Lampan	46.124	27.255	25.158	29.008	16.772	9.484	21.720	11.825	6.633	5.053	3.439	2.097	5.086	209.653
		11 Ikan Umpan	92.320	54.553	50.357	57.675	33.571	18.781	42.885	24.257	13.663	11.078	7.471	4.196	8.829	419.638
2.	Jaring Insang Tetap	1 Baung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 Lais	20.882	12.339	11.390	13.057	7.593	4.254	9.718	5.469	3.079	2.477	1.673	949	2.037	94.918
		3 Gabus	15.293	9.037	8.341	9.562	5.561	3.115	7.117	4.005	2.255	1.814	1.225	695	1.492	69.512
		4 Gurame	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5 Jelawat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 Tambakan	17.647	10.428	9.626	11.041	6.417	3.598	8.222	4.612	2.596	2.078	1.404	802	1.744	80.214
		7 Toman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8 Bauk	13.745	8.122	7.497	8.599	4.998	2.803	6.404	3.592	2.022	1.618	1.093	625	1.358	62.475
		9 Patik	22.117	13.069	12.064	13.837	8.043	4.510	10.305	5.780	3.253	2.604	1.759	1.005	2.186	100.532
		10 Entukan	30.507	18.027	16.640	19.116	11.093	6.237	14.260	7.927	4.457	3.515	2.380	1.387	3.121	138.666
		11 Seluang	12.988	7.675	7.084	8.126	4.723	2.648	6.051	3.395	1.910	1.529	1.033	590	1.283	59.036
3.	Rawai	1 Baung	25.179	14.878	13.734	15.908	9.156	5.216	11.968	6.344	3.548	2.576	1.766	1.144	3.031	114.449
		2 Belida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 Gabus	16.581	9.798	9.044	10.371	6.030	3.380	7.721	4.338	2.442	1.960	1.323	754	1.628	75.370
		4 Toman	84.288	49.806	45.975	52.515	30.650	17.073	38.938	22.363	12.617	10.469	7.038	3.831	7.564	383.126
		5 Tapah	20.695	12.229	11.288	12.921	7.525	4.206	9.602	5.449	3.070	2.502	1.686	941	1.953	94.067
4.	Bubu	1 Baung	527.806	311.885	287.894	330.810	191.929	107.939	246.820	137.039	77.040	60.649	41.074	23.991	54.240	2.399.118
		2 Belida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 Gabus	197.461	116.681	107.706	123.371	71.804	40.177	91.743	51.865	29.213	23.667	15.963	8.975	18.924	897.549
		4 Gurame	1.674	989	913	1.045	609	340	777	441	248	202	136	76	158	7.610
		5 Jelawat	61.503	36.342	33.547	38.833	22.365	12.728	29.196	15.533	8.692	6.353	4.351	2.796	7.319	279.557
		6 Lais	466.480	275.647	254.443	294.331	169.629	96.426	221.127	118.130	66.131	48.707	33.316	21.204	54.791	2.120.362
		7 Lele	60	35	33	37	22	12	28	16	9	7	5	3	6	272
		8 Tambakan	521.544	308.185	284.479	329.480	189.652	108.021	247.849	131.456	73.531	53.442	36.630	23.707	62.679	2.370.656
		9 Toman	224.618	132.729	122.519	140.772	81.679	45.930	105.023	58.335	32.796	25.836	17.496	10.210	23.047	1.020.993
		10 Patik	97.522	57.627	53.194	60.889	35.463	19.821	45.248	25.678	14.669	11.791	7.946	4.433	9.203	443.283
		11 Ikan Umpan	1.205.520	712.353	657.556	751.842	438.371	244.575	558.046	318.696	179.697	147.861	99.511	54.796	110.813	5.479.637
		12 Bauk	101.381	59.907	55.299	63.298	36.866	20.605	47.038	26.694	15.041	12.258	8.261	4.608	9.567	460.821
		13 Seluang	586.800	346.745	320.072	367.112	213.382	119.651	273.381	153.382	86.324	69.110	46.691	26.673	57.948	2.667.271
		14 Tapah	21.283	12.577	11.609	13.320	7.739	4.342	9.923	5.556	3.126	2.495	1.686	967	2.118	96.742
		15 Entukan	127.093	75.101	69.324	79.976	46.216	26.159	59.919	32.512	18.232	13.807	9.404	5.777	14.177	577.697
		16 Lampan	98.666	58.303	53.818	62.088	35.879	20.308	46.517	25.240	14.154	10.719	7.301	4.485	11.006	448.483
		17 Patin	35.855	21.187	19.557	22.562	13.038	7.380	16.904	9.172	5.144	3.895	2.653	1.630	3.999	162.976
		18 Bilis	32.274	19.071	17.604	20.150	11.736	6.559	14.974	8.498	4.788	3.902	2.630	1.467	3.045	146.698
		19 Tengadak	61.862	36.555	33.743	38.625	22.495	12.573	28.702	16.288	9.178	7.480	5.041	2.812	5.838	281.193
5.	Jala Tebar	1 Baung	81.547	48.187	44.480	51.370	29.654	16.813	38.530	20.777	11.643	8.722	5.950	3.707	9.288	370.670
		2 Gabus	777	459	424	489	283	160	366	199	111	84	57	35	87	3.532
		3 Jelawat	15.311	9.047	8.351	9.635	5.568	3.151	7.218	3.917	2.196	1.663	1.133	696	1.708	69.595
		4 Lais	62.509	36.937	34.096	39.339	22.731	12.868	29.476	15.985	8.964	6.782	4.620	2.841	6.985	284.131
		5 Tambakan	74.634	44.102	40.710	47.208	27.140	15.489	35.557	18.723	10.464	7.502	5.153	3.392	9.174	339.247
		6 Toman	5.741	3.392	3.131	3.561	2.087	1.155	2.628	1.547	875	752	503	261	461	26.094
		7 Entukan	94.278	56.841	52.469	60.104	34.979	19.574	44.699	25.259	14.227	11.518	7.769	4.372	9.234	435.326
		8 Tapah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9 Lampan	33.190	19.612	18.104	20.885	12.069	6.831	15.648	8.490	4.761	3.606	2.456	1.509	3.702	150.863
		10 Ikan Umpan	1.942	1.147	1.059	1.222	706	400	915	497	279	211	144	88	217	8.825
		11 Seluang	34.323	20.282	18.722	21.591	12.481	7.060	16.170	8.792	4.932	3.749	2.552	1.560	3.801	156.014
		12 Tengadak	36.784	21.736	20.064	22.967	13.376	7.476	17.067	9.685	5.457	4.448	2.997	1.672	3.471	167.200
6.	Pukat labuh	1 Entukan	1.696	1.002	925	1.067	617	349	799	434	243	184	125	77	189	7.707
		2 Baung Putih	1.271	751	693	800	462	262	599	325	182	138	94	58	142	5.779
		3 Belida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 Jelawat	848	501	462	533	308	174	337	217	122	92	63	102	95	3.853
		5 Lais	2.826	1.670	1.541	1.778	1.028	582	1.332	723	405	307	209	128	315	12.845
		6 Lampan	2.543	1.503	1.387	1.601	925	523	1.199	651	365	276	188	116	284	11.561
		7 Tambakan	4.945	2.922	2.697	3.112	1.798	1.018	2.331	1.265	709	537	366	225	552	22.478
JUMLAH		5.644.910	3.336.760	3.080.086	3.539.747	2.053.391	1.155.081	2.641.374	1.465.345	823.709	647.565	438.649	256.737	582.117	25.665.470	
Jumlah dalam Ton																25.665

Jumlah dalam Ton



Berdasarkan Tabel produksi Ikan berdasarkan alat tangkap di atas, maka dapat kita lihat bahwa berdasarkan urutan alat tangkap dapat kita lihat produksinya antara lain

1. Jaring insang Hanyut adalah
  - a. Selimbau dengan produksi 540.423 Kg
  - b. Jongkong dan bunut berberbagi angka yang sama yaitu dengan total produksi 338.889 Kg
  - c. Suhaid dengan total tangkapan 319.341 Kg
2. Jaring Insang Tetap adalah :
  - a. Selimbau produksi 133.178 Kg
  - b. Suhaid produksi 78.696 Kg
  - c. Jongkong produksi dan bunut Hilir produksinya sama yaitu 72.642
3. Rawai adalah
  - a. Selimbau produksi 146.743 Kg
  - b. Bunut Hilir 91.715 Kg
  - c. Suhaid produksi 86. 712 Kg
4. Bubu adalah
  - a. Selimbau 4.369.402 Kg
  - b. Suhaid 2.581. 919 Kg
  - c. Jongkong 2.383.310 Kg
5. Jala Tebar adalah
  - a. Selimbau 441.036 Kg
  - b. Suhaid 261.743 Kg
  - c. Jongkong 241.609 Kg
6. Pukat Labu
  - a. Selimbau 14.129 Kg
  - b. Bunut Hilir 8.891 Kg
  - c. Suhaid 8.349 Kg

Selimbau hampir mendominasi hamper semua alat tangka hal ini karena Kecamatan Selimbau berada di wilayah dan penyangga Danau Sentarum yang penduduknya bermata pencairan sebagai nelayan, sedangkan Kecamatan yang lain berada pada Daerah penyangga, Danau Sentarum juga menyimpan berbagai jenis ikan endemik asli Kapuas hulu.

Tabel 3.6  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran  
Meningkatkan produksi ikan tangkap 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target ( Ton )	Realisasi ( Ton )	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan produksi ikan tangkap	Ton	26.120	25.665	98
Capaian Kinerja sasaran Sangat Berhasil (98 %)					

Tabel 3.8  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran  
Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Produksi Ikan Tangkap Ton per tahun	27.720	25.665	92,58

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Ikan Tangkap Tahun 2022 sebesar 98,25 % dikategorikan "Sangat berhasil".

Realisasi kinerja Meningkatnya Produksi Ikan Tangkap Tahun 2022 sebesar 98,25 %

Realisasi kinerja tahun 2022 tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 26.120 Ton.

Realisasi kinerja Meningkatnya Produksi Ikan Tangkap tahun 2022 sebesar 25.665 ton jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 25.609 ton maka realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar – 2,53 Kg.

Realisasi kinerja indikator Meningkatnya Produksi Ikan Tangkap tahun 2022 sebesar 25.665 ton jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 27.720 ton maka tingkat kemajuan indikator Meningkatnya Produksi Ikan Tangkap tahun 2022 mencapai 92,58 %.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Meningkatnya Produksi Ikan Tangkap tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana yang digunakan untuk kegiatan pengawasan seperti mesin tempel yang kurang memadai dibandingkan dengan pelaku, alat komunikasi yang belum ada (HT) untuk memudahkan komunikasi saat menangkap pelaku
2. Masih ditemukannya masyarakat yang membudidayakan ikan invasif di keramba, salah satu nya ikan bawal
3. Faktor alam saat musim hujan sering terjadi banjir;
4. Sebagian nelayan beralih usaha dari nelayan utama ke nelayan sambilan (petani kratom) dikarenakan lebih menguntungkan;
5. Adanya larangan untuk menangkap jenis ikan tertentu seperti belida yang mana mempunyai nilai jual yang tinggi;
6. Masih ditemukan aktifitas penangkapan ikan dengan bahan dan alat dan atau cara yang dilarang/ membahaya aktivitas perairan (destructive fishing).

Sedangkan tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemberian bantuan sarana dan prasarana pengawasan kepada POKMASWAS seperti mesin tempel yang berukuran besar dan alat komunikasi berupa HT (Handy Talkie)
2. Melakukan sosialisasi kontrol budidaya ikan invasif yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak buruk yang terjadi apabila ikan invasif ini lepas liar ke perairan sungai dan danau.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan produksi perikanan tangkap dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Daratan Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Restocking;
5. Meningkatkan pengawasan pada wilayah perairan umum daratan dengan melibatkan peran serta Pokmaswas.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran 2 Meningkatnya Produksi ikan tangkap antara lain :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten Kota/Kota  
Sub Kegiatan:
  1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
  2. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
  3. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan ( TPI )  
Sub Kegiatan:
  1. Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
  2. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan  
Kegiatan:
  1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan:
    1. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
    2. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

Sasaran 3 : Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya

Sasaran "*Meningkatnya Produksi Budidaya*" bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan pembudidaya. Adapun cara mengukur Produksi budidaya adalah dengan melakukan survei, wawancara atau observasi dan dokumentasi terhadap Produksi Perikanan Budidaya yang terdiri dari budidaya dikeramba, budidaya dikolam, budidaya minapadi yang ada di Kapuas Hulu, dengan rumus

$$\text{Jumlah Produksi} = \text{keramba} + \text{Kolam} + \text{Minapadi}$$

Untuk mengukur *"Meningkatnya Produksi Pembudidaya"*, maka dilakukan survey yang dilakukan oleh enumerator, pengolah data, Validator dan Backup Validator bidang, yang menangani data produksi bidang perikanan budidaya. Data tersebut berupa data pembudidaya baik keramba, kolam, ikan hias maupun Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Unit Pembudidaya Mandiri (UPM) Perikanan. Metode yang digunakan adalah: Metode sampel dan wawancara pada lokasi Kecamatan yang potensi produksinya tinggi. Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 total produksinya adalah sebesar 35.079.900 Kg atau 35.079 ton melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 25.482 ton.

Tabel 4. PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA ( KOLAM, KERAMBA DAN MINAPADI ) KAB. KAPUAS HULU TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KOMODITI KOLAM				KOMODITI KERAMBA				KOMODITI MINAPADI	TOTAL PRODUKSI
		NILA	PATIN	LELE	BAWAL AIR TAWAR	PATIN	JELAWAT	BAUNG	TOMAN	NILA	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	HULU GURUNG	1.294.000	370.000	-	200.000	-	-	-	-	900	
2	BUNUT HULU	440.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	
3	MENTEBAH	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	KALIS	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	
5	PUTUSSIBAU SELATAN	-	5.230.000	904.000	-	-	-	-	-	-	
6	EMBALOH HILIR	-	-	-	-	20.000	-	-	590.000	-	
7	BUNUT HILIR	-	10.000	-	-	30.000	-	1.415.000	2.925.000	-	
8	BOYAN TANJUNG	80.000	25.000	-	-	-	-	-	-	-	
9	PENGKADAN	710.000	160.000	-	220.000	-	-	-	-	-	
10	JONGKONG	-	40.000	-	-	64.000	-	-	4.122.000	-	
11	SELIMBAU	-	-	-	-	150.000	-	-	12.449.000	-	
12	SUHAID	-	-	-	-	-	110.000	-	-	-	
13	BADAU	-	-	-	-	-	-	-	1.870.000	-	
14	BATANG LUPAR	-	20.000	-	-	-	-	-	1.150.000	-	
15	PUTUSSIBAU UTARA	-	-	370.000	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH TOTAL		2.594.000	5.895.000	1.274.000	420.000	264.000	110.000	1.415.000	23.106.000	900	35.078.900
		TON									35.079

Tabel 4.1 PRODUKSI BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA ( IKAN HIAS ) KAB. KAPUAS HULU TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KOMODITI			
		ARWANA SUPER RED	ARWANA SUPER RED ALBINO	ARWANA SUPER RED SILVER	ARWANA SUPER RED KUMPAI
1	2	3	4	5	6
1	HULU GURUNG	353	-	-	-
2	BUNUT HULU	386	-	-	-
3	MENTEBAH	317	-	-	-
4	KALIS	106	-	-	-
5	PUTUSSIBAU SELATAN	1.966	-	-	-
6	EMBALOH HILIR	228	-	-	-
7	BUNUT HILIR	417	-	-	-
8	BOYAN TANJUNG	85	-	-	-
9	PENGKADAN	666	-	-	-
10	JONGKONG	1.032	-	-	-
11	SELIMBAU	260	-	-	-
12	SUHAI	1.399	-	-	-
13	SEMITAU	1.773	-	-	-
14	BADAU	180	-	-	-
15	BATANG LUPAR	271	-	-	-
16	PUTUSSIBAU UTARA	1.145	-	-	-
JUMLAH TOTAL		10.584	-	-	-

Tabel 4.2 PRODUKSI PEMBENIHAN KAB.KAPUAS HULU TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KOMODITI					KOMODITI UNIT PEMBENIH AN RAKYAT	KOMODITI			REKAP TOTAL PRODUKSI BENIH
		UPTD BBI KELANSIN					NILA	UNIT PEMBENIHAN MANDIRI (UPM)			
		MAS	NILA	PATIN	JELAWAT	GURAMI		NILA	PATIN	LELE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MENTEBAH	14.770	218.149	78.000	60.660	42.240	-	-	-	-	413.819
2	PENGKADAN	-	-	-	-	-	246.500	-	-	-	246.500
3	PUTUSSIBAU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	542.746	-	542.746
JUMLAH TOTAL		14.770	218.149	78.000	60.660	42.240	246.500	-	542.746	-	1.203.065

Berdasarkan table diatas maka dapat kita lihat 5 besar kecamatan produksi ikan budidaya berdasarkan jenis Ikan paling banyak adalah Sebagai berikut: 1 HULU GURUNG IKAN NILA dengan produksi 1.294.000 Kg, 2 PENGKADAN IKAN NILA dengan produksi 710 .000 Kg, 3. BUNUT HULU IKAN NILA dengan produksi 440.000 Kg. Ikan Patin dengan produksi terbesar berada di kecamatan Putussibau Selatan dengan total produksi 5.230.000, yang kedua adalah Kecamatan Hulu Gurung dengan Total produksi 370.000 Kg kemudian Kecamatan Pengkadan dengan Total Produksi 160.000 Kg untuk Ikan Patin didominasi khususnya untuk Kolam didominasi oleh 3 kecamatan tersebut. Ikan LELE untuk kolam terbatas pada 2 kecamatan yaitu kecamatan Putussibau Selatan Sebesar 904.000 Kg. dan Putussibau

Utara Sebesar 370.000 Kg. Sama Halnya dengan Ikan Lele Ikan Bawal air Tawar juga terbatas yaitu pada kecamatan Pengkadan dan Kecamatan Hulu Gurung, Pengkadan dengan produksi bawal air tawar sebesar 220.000 Kg, dan Hulu Gurung dengan produksi 200.000 Kg. Khusus untuk Keramba terbatas pada jenis ikan Patin, Jelawat, Baung, Toman, Nila, dengan total produksi 12.449.000 Kg. Sedangkan pada Budidaya MINAPADI hanya ada 1 lokasi yaitu di kecamatan HULU GURUNG dengan Total produksi 900 Kg.

Tabel 4.3  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Produksi budidaya Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2022 ( Ton )	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	ton	25.482 Ton	35.079 Ton	138
Capaian Kinerja sasaran Sangat Berhasil (138 %)					

Tabel 4.4  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran  
Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra ( ton )	Realisasi 2022 ( ton )	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	25.990	35.079	135 %

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya produksi perikanan budidaya Tahun 2022 sebesar 138 % dikategorikan "Sangat berhasil".tetapi terdapat penurunan produksi Capaian Meningkatnya produksi perikanan budidaya dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi kinerja *Meningkatnya Produksi Pembudidayaan* Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 mencapai 35.079 ton Realisasi kinerja tahun 2022 tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 25.480 ton.

Realisasi kinerja indikator meningkatnya produksi perikanan budidaya tahun 2022 sebesar 35.079 ton jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 35.543 ton, maka realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 464 Kg



Realisasi kinerja indikator jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2022 sebesar 35.079 ton jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 25.990 ton, maka tingkat kemajuan indikator jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 135 %.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan pencapaian indikator produksi perikanan budidaya tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Minimnya sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya ikan di wilayah Desa Nanga Tepuai tempat dilaksanakannya pelatihan budidaya ikan dan pakan ikan sehingga pelaksanaan praktek pelatihan budidaya ikan kurang optimal.
2. Pada waktu bantuan yang akan disalurkan kadang terkendala karena adanya kondisi banjir dan sulitnya akses kelokasi tujuan. Kemudian permasalahan lain adalah berkaitan dengan masih terbatasnya wawasan anggota kelompok dalam menyusun administrasi kelompok yang baik yang berkaitan dengan proposal dan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan kegiatan dalam usaha budidaya ikan.
3. Minimnya sarana dan prasarana perikanan budidaya dan kurangnya pengetahuan, wawasan serta keterampilan kelompok mengenai penyusunan administrasi kelompok dan masih rendahnya keinginan dan komitmen untuk menerima bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan sehingga ada 3 kelompok yang tidak menerima penyaluran bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan.

Adapun 3 kelompok yang tidak menerima penyaluran bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan yaitu :

1. Kelompok Pembudidaya Ikan di Desa Datah Diaan Kecamatan Putussibau Utara
2. Kelompok Pembudidaya Ikan di Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar
3. Kelompok Pembudidaya Ikan di Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir
4. Kegiatan Pekan Daerah (PEDA) di Kecamatan Hulu Gurung tidak dilaksanakan karena tidak adanya kegiatan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Tidak terlaksananya kegiatan uji coba system bioflok dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dan kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di fokuskan pada kegiatan prioritas di bidang perikanan budidaya.
6. Minimnya sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya ikan di wilayah Desa Nanga Tepuai tempat dilaksanakan pelatihan budidaya ikan dan pakan ikan sehingga pelaksanaan praktek pelatihan budidaya ikan kurang optimal

7. Masih adanya Pembudidaya Ikan Kecil dan Pelaku Usaha Perikanan yang mendaftarkan usahanya tidak tepat dalam memilih kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)
8. Kurangnya Minat Pembudidaya di Minapadi
9. Harga Pakan yang Tinggi
10. Adanya 2 kelompok penerima bantuan yang tidak dapat di realisasikan bantuannya di karekan faktor alam yaitu banjir
11. Tidak adanya penyedia barang dan jasa yang mendaftar di E-Katalog
12. Penyusunan jadwal perencanaan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan anggaran yang tersedia

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka meningkatnya produksi pembudidaya Kabupaten Kapuas Hulu di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya
2. Memberikan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3. Penguatan Identifikasi dan penyusunan rencana kegiatan perikanan budidaya dengan berdasarkan pada Musyawarah Rencana Pembangunan baik Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
4. Pelatihan peningkatan kapasitas pembudidaya ikan dan penyusunan administrasi kelompok
5. Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya
6. Memberikan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
7. Memberikan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
8. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu mengenai sosialisasi dan penerbitan perizinan usaha perikanan untuk pembudidaya ikan kecil dan pelaku usaha perikanan.
9. Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya
10. Memberikan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
11. Melakukan observasi terhadap lokasi penerima bantuan terkait layak dan tidaknya lokasi tersebut.

12. Melakukan sosialisasi atau mendorong penyedia barang dan jasa untuk mendaftar di E-Katalog
13. Memperbaiki jadwal perencanaan kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran 3 antara lain :

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya  
Kegiatan:
  1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Sub Kegiatan:
  2. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
  3. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan:
  1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota
  4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota
  5. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

Sasaran 4 : 1. Meningkatnya jumlah Produksi Ikan Olahan

Sasaran "*Meningkatnya jumlah Produksi ikan olahan*" bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pelaku pengolah hasil perikanan. Adapun cara mengukur jumlah produksi ikan olahan adalah jumlah produk olahan hasil perikanan yang terdiri dari kerupuk basah, kerupuk kering, ikan asin, ikan asap dan lain-lain rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

Total Produksi = ( kerupuk basah+kerupuk kering+ikan asin+ikan asap dan lain-lainnya )

Untuk mengukur "*Meningkatnya jumlah Produksi Ikan Olahan*", maka dilakukan survey oleh enumerator, pengolah data dan validator dan backup validator bidang yang ada pada bidang KTPI. Metode tersebut dilakukan dengan metode wawancara dan survei pada lokasi

yang mempunyai potensi produksi olahan yang tinggi Adapun hasilnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 4.5 produksi Olahan Hasil Perikanan Kab. Kapuas Hulu Th. 2022

NO	KECAMATAN	KOMODITAS (ton)					JUMLAH
		KERUPUK BASAH	KERUPUK KERING	IKAN ASAP	IKAN ASIN	LAIN-LAIN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Putussibau Utara	114,80	-	-	-	-	114,80
2	Putussibau Selatan	97,90	-	-	-	-	97,90
3	Bika	-	-	-	76,80	-	76,80
4	Semitau	254,10	450,20	225,40	342,00	48,46	1.320,16
5	Suhaid	320,70	651,90	274,80	468,20	107,20	1.822,80
6	Selimbau	316,00	899,30	386,50	597,40	180,60	2.379,80
7	Jongkong	435,10	981,20	153,84	501,62	173,10	2.244,86
8	Bunut Hilir	330,10	385,90	180,66	352,84	96,54	1.346,04
9	Embaloh Hilir	260,20	225,60	144,30	245,80	65,34	941,24
10	Embaloh Hulu	85,90	222,30	-	104,70	35,14	448,04
11	Batang Lupar	49,90	26,40	63,60	85,85	12,50	238,25
12	Badau	30,50	19,60	44,20	90,89	-	185,19
13	Empanang	32,90	25,70	64,80	91,50	-	214,90
14	Silat Hilir	72,40	75,40	78,40	83,70	25,32	335,22
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.400,50</b>	<b>3.963,50</b>	<b>1.616,50</b>	<b>3.041,30</b>	<b>744,20</b>	<b>11.766,00</b>

Dari hasil produksi berdasarkan table diatas maka dapat kita lihat sebaran produksi kerupuk basah, kerupuk kering, ikan asap, ikan asin, lain-lain yang bisa dilihat pada table diatas: untuk kerupuk basah produksi paling tinggi berada di kecamatan Jongkong dengan produksi 435,10 ton, urutan ke 2 berada dikecamatan bunut hilir dengan produksi 330,10 ton, urutan ke 3 berada dikecamatan Suhaid dengan produksi 320,70 ton, urutan ke 4 berada di kecamatan selimbau dengan produksi 316,00 dan urutan ke 5 berada di kecamatan Putussibau Utara, secara keseluruhan produksi kerupuk basah sebesar 2.400,50 ton

Untuk komoditi olahan kerupuk kering total produksi pada tahun 2022 adalah 3.963,50 ton dengan sebaran produksi jongkong 981,20 ton, selimbau 899,30 ton, suhaid 651,90 ton, Semitau dengan produksi 450,20 ton, bunut hilir 385,90 ton.

Salah satu hasil olahan perikanan yang banyak digemari salah satunya adalah ikan asap dan dari table diatas maka dapat kita lihat 3 kecamatan dengan produksi ikan asap terbesar yaitu: Selimbau dengan produksi 386,50 ton, Suhaid 274,80 ton, Semitau 225,40 ton,

Yang tidak kalah produk olahan yang laris di pasar adalah ikan asin, berdasarkan sebaran ikan asin pada tahun 2022 maka dapat kita lihat produksi ada pada 3 kecamatan berikut ini antara lain Selimbau dengan total produksi 591,40, Jongkong dengan total produksi 501,62, Suhaid 468, 20 ton

Untuk produk olahan lain yang tidak masuk ke dalam empat produk olahan di atas maka produk olahan perikanan tersebut masuk ke produk olahan lain-lain dengan sebaran produksi di antaranya adalah Selimbau 180,60 ton, Jongkong 173,10 ton, Suhaid 107, 20 ton.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah hasil produksi ikan olahan ( dalam ton pertahun) yang semula ditargetkan sebesar 11.370 ton sedangkan realisasinya sebesar 11. 766 ton dengan capaian produksi sebesar 10, 35%

Tabel 3.12  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran  
Meningkatnya jumlah produksi ikan olahan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target ( Ton )	Realisasi ( Ton )	Capaian (%)
1	2	3	4	6	7
1	Jumlah hasil produksi ikan olahan ( ton pertahun )	ton	11.700	11.766,	100,6

Tabel 3.14  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran  
Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2026 ( Ton )	Realisasi 2022 ( Ton )	Tingkat Kemajuan ( % )
1	2	3	4	5
1	Jumlah hasil produksi ikan olahan ( ton pertahun )	13.000	11.766	90,5

Capaian kinerja sasaran meningkatnya Jumlah hasil produksi ikan olahan ( ton pertahun ) tahun 2022 sebesar 135 % di katagorikan Sangat berhasil

Realisasi kinerja Jumlah hasil produksi ikan olahan ( ton pertahun ) tahun 2022 mencapai 11.766 ton jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 11.543 ton

Realisasi kinerja Jumlah hasil produksi ikan olahan ( ton pertahun ) tahun 2022 sebesar 11.766 ton jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 13.000 maka tingkat kemajuan indicator Jumlah hasil produksi ikan olahan ( ton pertahun ) tahun 2022 mencapai 90,5 %

Adapun beberapa faktor pendukung pencapaian indikator Jumlah hasil produksi ikan olahan ( ton pertahun ) adalah sebagai berikut :

1. Biaya operasional besar karena lokasi antara masyarakat pengolah jaraknya berjauhan (Dari danau ke danau)

2. Jangkauan Masyarakat jauh dari ibu kota Kabupaten (Desa-desa di pesisir sungai kapuas)
3. Jangkauan Masyarakat jauh dari ibu kota Kabupaten (Desa-desa di pesisir sungai kapuas)
4. Jangkauan lokasi masyarakat pengolah jauh dari Ibu Kota Kabupaten
5. Biaya operasional lumayan besar

Tindak lanjut dari permasalahan tersebut diatas antara lain :

1. Biaya operasional dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin
2. Pengambilan data dilakukan secara sampel.
3. Biaya operasional dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin
4. Pengambilan data dilakukan secara sampel
5. Biaya operasional dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

Selain dari tindak lanjut dari kendala yang ada juga mampu atau telah merealisasikan :

1. Tercapainya angka konsumsi ikan sebesar 40,7 Kg/Kapita
2. Tercapainya persentase pengolah yang terdata sebesar 12% dari total 477 pengolah
3. Tercapainya Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko sebanyak 1 Dokumen
4. Jumlah Poklamsar yang menerima bantuan pada tahun 2022 sebanyak 9 Kelompok dengan rincian 3 Kelompok berasal dari dana DPA Dinas Perikanan dan 6 Kelompok mendapatkan bantuan dari Dana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP).

A. 3 Kelompok melalui DPA Dinas Perikanan :

- A. Kelompok Berkah Lestari Desa Nanga Embaloh, Kecamatan Embaloh Hilir.
- B. Kelompok Usaha Bersama Desa Dalam, Kecamatan Selimbau.
- C. Kelompok Sekaban Jaya Desa Bunut Tengah, Kecamatan Bunut Hilir

B. 6 Kelompok melalui Dana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Poklamsar Anggrek Hitam, Desa Gudang Hilir, Kecamatan Selimbau berupa Bantuan Sarana Peralatan Pengolahan (Value Added)
2. Poklamsar Buluh Segompong, Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hilir berupa Bantuan 1 Buah Chest Freezer
3. Poklamsar Buluh Segompong, Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hilir berupa Bantuan 1 Buah Chest Freezer
4. berupa Bantuan 1 Buah Chest Freezer

5. Poklamsar Manis Madu, Desa Gudang Hilir, Kecamatan Selimbau berupa Bantuan 6 Unit Cool Box
6. Poklamsar Cempaka, Desa Gudang Hilir, Kecamatan Selimbau berupa Bantuan 6 Unit Cool Box
7. Poklamsar Do'a Ibu, Desa Gudang Hilir, Kecamatan Selimbau berupa Bantuan 6 Unit Cool Box

#### 1. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan :

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

#### C. REALISASI ANGGARAN

##### 1. Pengelolaan Belanja Dinas

Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang Keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan Keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan berdasarkan pada *'value for money'*. Disamping itu pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik.



## 2. Target dan Realisasi Belanja

Target dan realisasi Pendapatan selama Tahun 2022 sebagaimana tercantum Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat sebagai berikut :



**Tabel 3.15 Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ALOKASI	REALISASI	%
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>15.386.642.877,00</b>	<b>12.743.620.466</b>	<b>82,87</b>
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.365.400,00	8.364.400,00	<b>99,99</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.900.000,00	2.900.000,00	<b>100,00</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.900.000,00	2.899.700,00	<b>99,99</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.900.000,00	2.900.000,00	<b>100,00</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.780.000,00	2.780.000,00	<b>100,00</b>
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.087.100,00	145.947.100,00	<b>99,90</b>
b.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.375.525.987,00	3.354.359.175,00	<b>99,37</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	344.340.000,00	343.590.000,00	<b>99,78</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.060.000,00	7.060.000,00	<b>100,00</b>
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.370.000,00	6.370.000,00	<b>100,00</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	11.860.000,00	11.860.000,00	<b>100,00</b>
c.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH			
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	39.402.000,00	39.396.500,00	<b>99,99</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.513.500,00	14.440.800,00	<b>99,50</b>
d.	ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH			
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.391.500,00	4.391.500,00	<b>100,00</b>
e.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	33.320.000,00	33.320.000,00	<b>100,00</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.375.000,00	9.195.000,00	<b>98,08</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.407.000,00	10.107.000,00	<b>97,12</b>
f.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	21.279.000,00	21.279.000,00	<b>100,00</b>
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.400.000,00	3.400.000,00	<b>100,00</b>
	Penyediaan Berang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	19.998.000,00	<b>99,99</b>
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000,00	8.400.000,00	<b>100,00</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.922.400,00	161.922.400,00	<b>100,00</b>
g.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.300.000,00	60.245.694,00	<b>98,28</b>
h.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.124.000,00	93.238.044,00	<b>98,02</b>
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.942.000,00	29.942.000,00	<b>100,00</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.910.704.790,00	1.882.066.774,00	<b>98,50</b>
i.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187.080.800,00	185.822.000,00	<b>99,33</b>
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAN PERIKANAN TANGKAP</b>			
a.	PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI,DANAU,WADUK,RAWA,DAN GENANGAN AIR LAIINYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (Satu) DAERAH KABUPATEN/KOTA			

	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	64.348.300,00	64.333.200,00	99,98
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	48.386.450,00	48.351.050,00	99,93
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.590.531.950,00	1.542.072.557,00	96,95
b.	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH /KABUPATEN KOTA			
	Pengembangan Kapasitas Nelayan kecil	30.985.400,00	30.911.650,00	99,57
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	10.805.050,00	10.657.250,00	98,63
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10.496.650,00	10.495.000,00	99,98
c.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	59.792.000,00	59.331.000,00	99,23
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	57.711.150,00	57.526.725,00	99,68
3.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>			
a.	PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL			
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1.129.067.500,00	984.167.500,00	87,17
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	32.735.350,00	32.735.350,00	100,00
c.	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN			
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.912.250,00	34.609.950,00	99,13
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.122.978.200,00	519.115.900,00	23,98
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.844.193.550,00	2.068.051.050,00	72,71
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.390.500,00	26.668.000,00	97,36
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	39.061.200,00	38.960.700,00	99,74
4.	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			
a.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/kota			
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Sungai, danau, waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	24.406.350,00	24.405.900,00	100,00
	Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya di wilayah Sungai, danau, waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	25.546.400,00	25.535.350,00	99,96
5.	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>			
a.	Pembinaan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil			
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.028.500,00	24.748.500,00	98,88
b.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	629.410.300,00	627.891.747,00	99,76
c.	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten			
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.903.350,00	15.857.000,00	99,71
		<b>15.386.642.877</b>	<b>12.743.620.466</b>	<b>82,94</b>

### 3. Analisis Penggunaan Sumberdaya Keuangan

Analisis penggunaan sumberdaya keuangan terhadap capaian kinerja dapat diukur dengan menghitung capaian kinerja dikurangi capaian anggaran. Sehingga tingkat efesiensi dari perbandingan realisasi capaian kinerja dengan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.16  
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran  
Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat (Efesiensi % )
			Target	Realisasi	Capaian ( % )	Target	Realisasi	Capaian ( % )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	1. Nilai Reformasi birikrasi	BB	BB	100	6.521.650.477	6.466.195.087	99, 15	0, 99
		2. Predikat Sakip pada Dinas Perikanan	BB	BB	100				
2	Meningkatnya Produksi Ikan Tangkap	Produksi ikan Tangkap dalam ( ton pertahun )	26.120	25.665	98	1.923.010.000	1.873.619.682	97, 43	0, 54
3	Meningkatnya Produksi Ikan Budidaya	Produksi ikan budidaya dalam ( ton pertahun )	25.482	35.079	138	6.230.338.550	3.704.308.450	59, 45	78, 6
4	Meningkatnya produksi ikan olahan hasil	Jumlah hasil produksi ikan olahan ( ton pertahun )	11.700	11.766	100,6	690.342.150	688.497.247	99, 73	0,87

Sasaran meningkatnya Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan jika dibandingkan dari capaian kinerja BB (100 % ) dengan anggaran sebesar Rp. 6.521.650.477,00 ( 97,13 % ) dapat meningkatkan efesiensi anggaran sebesar 0,99 %. Sasaran, meningkatnya produksi ikan tangkap dengan anggaran sebesar 1.923.010.000 dan dengan capaian produksi 97, 43 dapat meningkatkan efesiensi anggaran sebesar 0, 54. Sasaran meningkatnya produksi Ikan Budidaya dengan anggaran sebesar 6.230.338.550 sedangkan realisasinya sebesar 3.704.308.450 hal ini terjadi karena ada beberapa kegiatan budidaya yang tidak terlaksana atau, Capaian Efesiensinya lebih tinggi dari bidang yang lainnya. Yaitu sebesar 78, 6 %. Sasaran meningkatnya produksi Ikan

Olahan dengan anggaran sebesar 690.342.150 realisasi anggaran sebesar 688.497.247 dengan capaian 99,73 dapat meningkatkan efisiensi anggaran sebesar 0,87

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari LKIP Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi, dengan predikat “Sangat Berhasil”, hal ini ditandai dari empat sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu telah mencapai target dan sasaran target yang telah ditetapkan pada Renstra. Dengan demikian, pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada Rencana Strategis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Renstra telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

Secara Global hasil pembangunan perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 ditinjau dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis seluruh capaian kinerja, maka pada tahun 2022 Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan capaian kualitatif sebesar 455,76 % dari sasaran tersebut di atas, telah memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu untuk terus meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu dimasa yang akan datang terutama halnya dalam sektor perikanan umum.

#### B. HAMBATAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, namun secara bertahap mengalami perbaikan dan peningkatan walaupun belum secara signifikan baik pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, hal ini disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Sumber Daya Aparatur dan Pelaku Perikanan meliputi :
  - a. Keterbatasan Tenaga terutama tenaga penyuluh dilapangan
  - b. Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Aparatur yang belum Optimal
  - c. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Kelompok Pembudidaya Ikan, Nelayan serta Kelompok Pengolah Hasil Perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan
  - d. Inovasi untuk meningkatkan produksi masih dirasakan kurang.
2. Dukungan Sarana meliputi :

- a. Sarana Mobilitas perlu ditingkatkan secara kuantitas
- 3. Dukungan Permodalan dan Pemasaran Hasil Perikanan:
  - a. Keterbatasan kemampuan permodalan petani Nelayan untuk mengembangkan usahanya.
  - b. Terbatasnya kegiatan pemasaran dan distribusi/pengangkutan hasil-hasil perikanan.
  - c. Masih belum optimal promosi atau terekspos produk perikanan baik produk budidaya maupun olahan.

Luasnya sebaran perairan umum yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dengan daya jangkau masih yang cukup sulit dan memerlukan alokasi dana yang cukup besar masih menjadi kendala secara teknis serta kuantitas dan kualitas SDM guna mendukung memenuhi luasnya sebaran. Guna mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan Perencanaan kegiatan lebih terarah serta tepat guna dalam menyusun Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian anggaran yang berbasis kinerja dengan tolak ukur Renstra dan standar analisa belanja serta dilengkapi peningkatan standar pelayanan minimal.
2. Membangun, merehabilitasi serta mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap, budidaya maupun pemasaran hasil usaha perikanan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Pemanfaatan bahan baku pakan alternatif yang murah dan mudah didapat.
4. Terus meningkatkan pemberdayaan pelaku pembudidaya ikan serta nelayan melalui pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan keterampilan, penguasaan teknologi serta pengembangan kelembagaan
5. Sektor perikanan harus berorientasi pada ekspor, baik secara lokal, maupun secara nasional, hal dapat didukung melalui industrialisasi melalui komoditas utama yang ada Di Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam pengelolaannya, pola kemitraan antara industri, pemerintah dan masyarakat harus terjalin. Melalui industrialisasi, akan memberikan benih dan material lainnya untuk kemudian di budidayakan. Pemerintah juga harus berperan sebagai pembuat regulasi diantaranya dalam pengendalian harga sehingga tetap bisa bersaing di pasar luar.
6. Peningkatan kualitas sumberdaya kelembagaan serta pranata sosial di kalangan masyarakat pengelola sumberdaya ikan sehingga akses sumberdaya modal akan semakin dekat dan kuat.

7. Membangun kapasitas kelembagaan yang handal untuk mendukung kegiatan perencanaan eksplorasi dan eksploitasi serta pelestarian sumberdaya kelautan dan pengembangan basis data.
8. Terus Meningkatkan kegiatan promosi produk perikanan di berbagai kesempatan Pameran dengan harapan adanya kerjasama pemasaran atau investasi kesektor perikanan

Keberhasilan pembangunan Perikanan bergantung pada partisipasi seluruh *stakeholders* perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, maka faktor kerjasama dan koordinasi diperlukan sedini mungkin yaitu sejak tahap perencanaan yang terus dikembangkan secara serasi pada tahap pelaksanaan serta pengawasan selain itu pembangunan perikanan juga tergantung dari sistem pelaksanaan pembangunan yang *bottom up* dengan senantiasa mempertimbangkan aspirasi dari bawah utamanya pembudidaya ikan dan nelayan sebagai obyek pembangunan perikanan kabupaten Kapuas Hulu.

Akhirnya saran dan masukan yang bersifat membangun dari pihak terkait sangat kami harapkan guna penyempurnaan LAKIP ini.

Putussibau, 24 Februari 2023

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Kapuas Hulu,

BAMBANG, S.E.,M.Si  
Pembina Tingkat 1/IVb  
NIP. 19670515 199503 1 005



## LAMPIRAN

### STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Peraturan Bupati Kapuas Hulu

Nomor : 63 Tahun 2016

Tanggal : 7 November 2016

